

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH**

( LAKIP )  
TAHUN 2022



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

### **1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara**

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Badan Pendapatan mempunyai tugas menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kab. Morowali Utara yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan program / rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

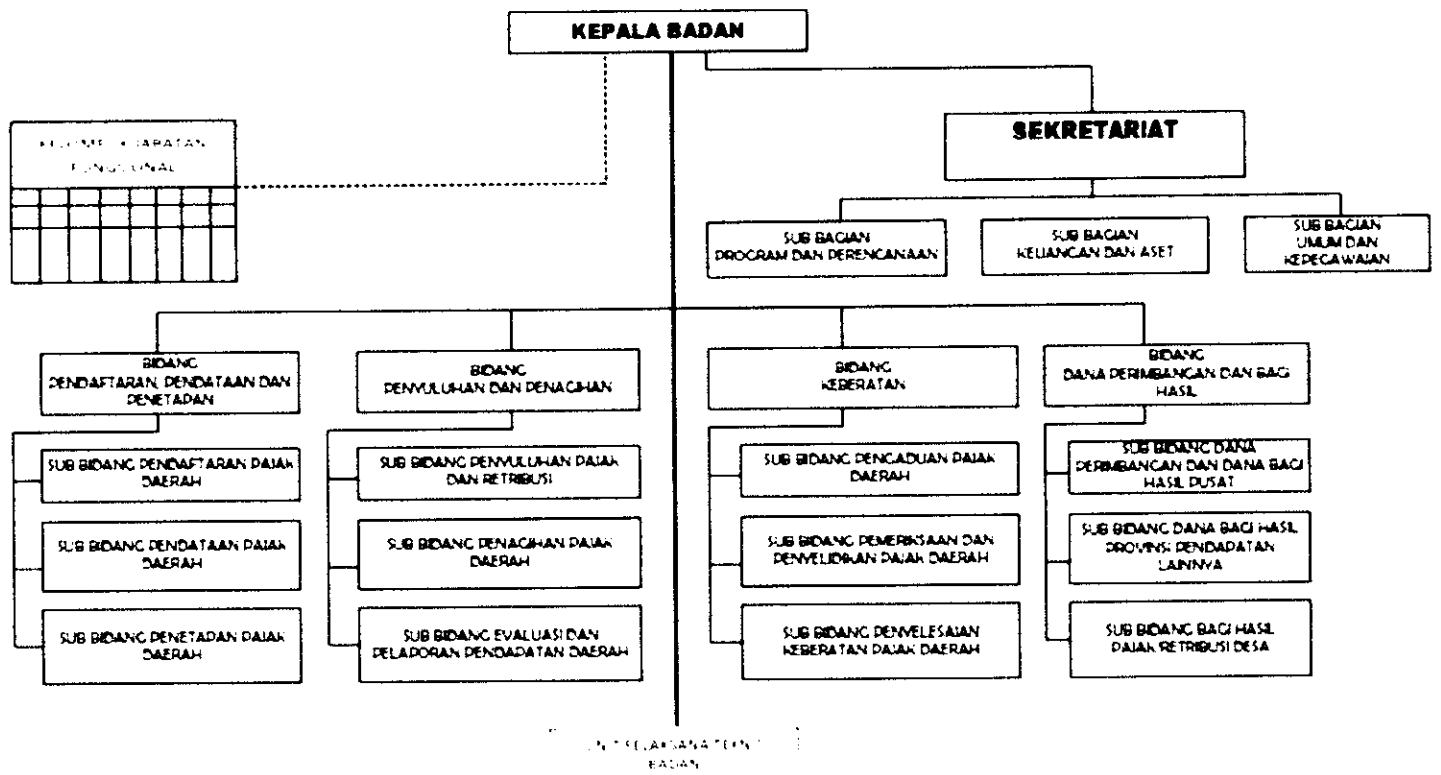
### **1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Badan Pendapatan**

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya yang ada di Kab. Morowali Utara. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu PD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

### **1.4 Struktur Badan Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara**

Badan Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi yang terdiri Sekretariat yang membawahi tiga kepala Sub Bagian, Empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Sub Bidang , adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



KETERANGAN:  
 - : Kepala Bidang  
 - : Kepala Sub Bidang  
 - : Kepala Sub Bagian

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Rencana Strategis Badan Pendapatan**

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah, sehingga diperlukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah secara berkelanjutan.
2. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan Daerah yang akuntabel.
3. Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah.

**2.2 Sistematisasi Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2026 adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Profesional ”

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Profesional	1 Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan
	2 Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara

		<p>yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik;</li> <li>2. Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah;</li> <li>3. Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah;</li> <li>4. Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah;</li> <li>5. Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan;</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan;</li> <li>7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan</li> <li>8. Standar Pembiayaan</li> </ol>
--	--	--

		yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar
	3 Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### 2.3 Sasaran dan Tujuan Badan Pendapatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Badan Pendapatan mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten
2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

### 3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
1.	Indeks RB	o Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	o Opini BPK

#### 2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan

Badan Pendapatan menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) BADAN PENDAPATAN**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>RUMUS IKU</b>
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Persentase peningkatan PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD Tahun } n - \text{Jumlah PAD Tahun } n-1}{\text{Jumlah PAD Tahun } n-1} \times 100\%$

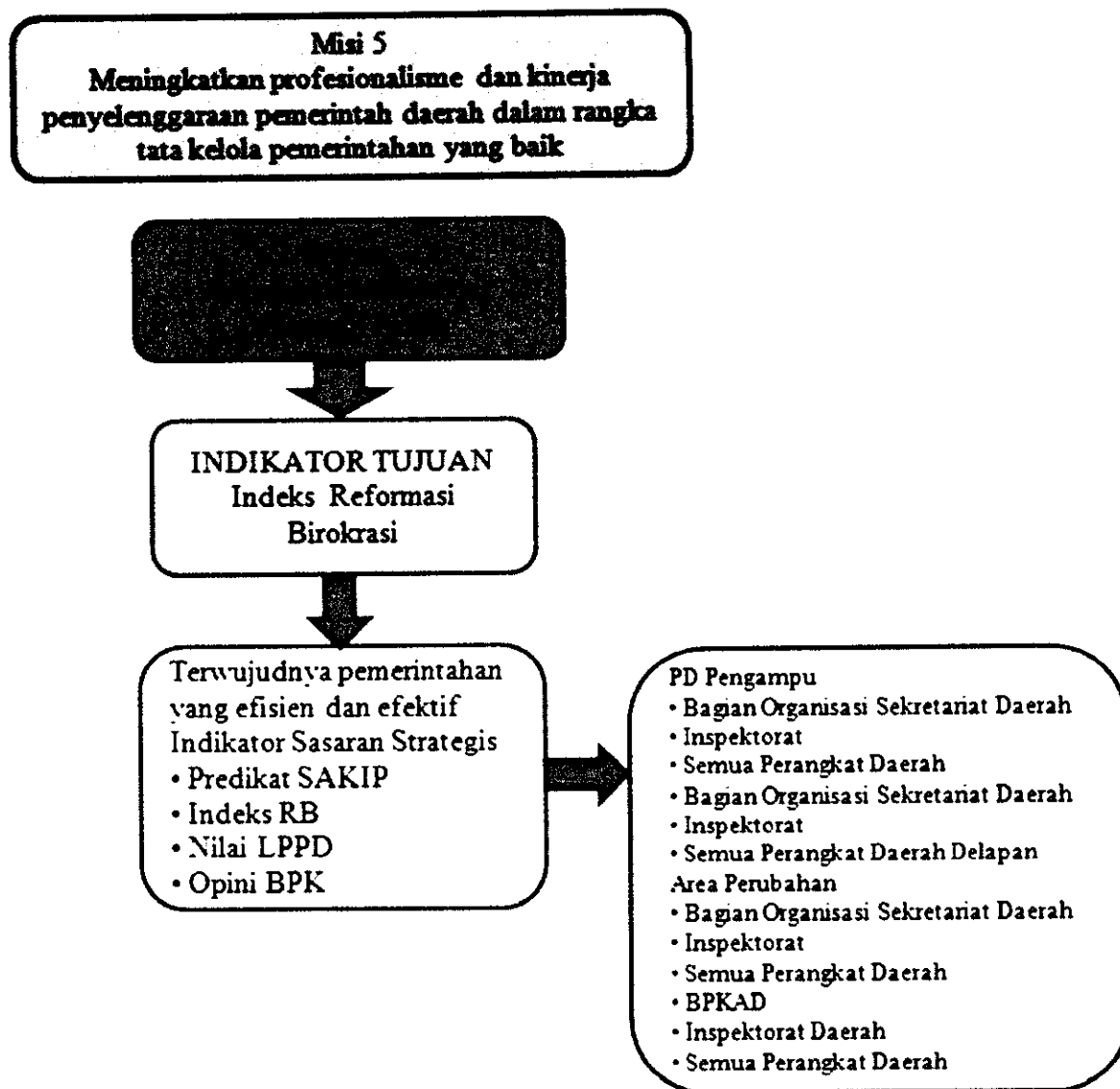
#### 2.5 Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas*/ hubungan sebab akibat

dan *alignment*/ keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 5 :



## 2.6 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Badan Pendapatan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	25 %

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.166.534.927	
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.437.310.050	

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**a. Perbandingan Taget Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel. 4**  
**Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022**

<b>N O</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>FORMULASI IKU</b>
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	-8,74%	(Jumlah PAD Tahun n-Jumlah PAD Tahun n-1)/ (Jumlah PAD Tahun n-1) x 100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					-8,74%	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Pendapatan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel. 5**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan tahun 2022.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kerjanya adalah sebagai berikut :

**Tabel. 6**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50	1	Sangat Rendah
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel: 7**  
**Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten**  
**Morowali Utara Tahun 2022**

N o	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91 ≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1	Presentase Peningkatan PAD	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	-8,74%					√

Gambaran pencapaian kinerja dari (1) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Sasaran Kesatu Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah terhadap PAD.**

Sasaran kesatu **Presentase Peningkatan PAD**, pada Tahun 2022 capaian kinerja mengalami penurunan -8,74% jika dibandingkan dengan tahun 2021 dengan indikator ≤50 dan predikat Sangat Rendah.

**b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026.**

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel. 8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022**

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	103.899.132.338,74	99,91%	94.822.627.014,10	-8,74%

**1. Sasaran Meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak .**

Dari tabel diatas pada **Presentase Peningkatan PAD**, berdasarkan tabel di atas realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 99.91%

mengalami penurunan pada tahun 2022 baik realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan predikat Sangat Rendah karena beberapa kendala yang dialami.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah**

Realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	48%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu (1) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya  $\leq 50\%$  (kurang dari target Renstra)

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

**1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah**

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain mengadakan sosialisasi tentang Pajak Daerah di

Kecamatan yang diikuti oleh Kepala-Kepala Desa, bekerja sama dengan UPTB Kecamatan untuk melakukan penagihan pajak, serta turun langsung melakukan penagihan pajak serta sosialisasi ke pemilik-pemilik hotel, restoran/ warung makan (wajib pajak)

Adapun yang menjadi kendala atau tantangan yang dihadapi sehingga mengakibatkan penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- Kenaikan NJOP PBBP2 yang berimbas pada keberatan wajib pajak atas ketetapan pajak;
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
- Kurangnya infrastruktur yang mendukung proses penagihan pajak terutang;
- Kurangnya infrastruktur untuk menggali potensi pajak daerah; dan
- Kurangnya sosialisasi tentang pajak daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena keterbatasan pagu anggaran.

#### e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

##### a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.885.219.417,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.711.277.217,-
<b>Alokasi Total Belanja</b>		<b>Rp. 8.596.496.634,-</b>

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.596.496.634,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.999.506.766,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.707.700.225,-
<b>Alokasi Total Belanja</b>		<b>Rp. 7.707.206.991,-</b>

Presentase serapan anggaran di Tahun 2022

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.999.506.766,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.707.700.225,-
<b>Alokasi Total Belanja</b>		<b>Rp. 7.707.206.991,-</b>

a. Belanja Langsung =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}} \times 100\%$

=  $\frac{\text{Rp } 3.707.700.225}{\text{Rp } 3.711.277.217} \times 100\%$

= 99,90%

b. Belanja Tidak Langsung =  $\frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}} \times 100\%$

=  $\frac{\text{Rp } 3.999.506.766}{\text{Rp } 4.885.219.417} \times 100\%$

= 81,86%

c. Total Belanja =  $\frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\%$

=  $\frac{\text{Rp } 7.707.206.991}{\text{Rp } 8.596.496.634} \times 100\%$

= 89.65%

**b. Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan daerah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang PNS dan 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Honorer. Dari jumlah keseluruhan tersebut, Badan Pendapatan Daerah bekerja dengan semaksimal mungkin, bekerjasama antar bidang, saling berkoordinasi antar bagian guna melaksanakan tugas/ fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk tercapainya target peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

**f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022**

**1. Sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Didukung oleh Program :**

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain:

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan penunjang pemerintahan dibagian keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan

anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

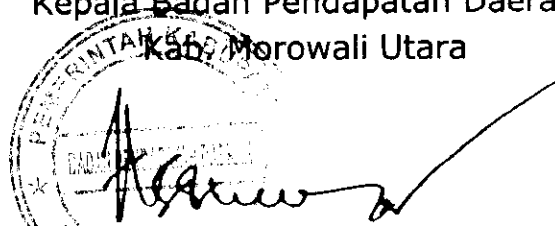
Badan Pendapatan periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Badan Pendapatan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 10**  
**REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN**  
**TAHUN 2022**

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Persentase Peningkatan PAD	25%	-8,74%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	196.970.875.146,00	94.822.627.014,10	48,14%

Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kab. Morowali Utara

  
**AGUNG Satria Ponga, ST. MM**  
 NIP. 19661206 200003 1 003

**BAB IV**  
**KESIMPULAN**  
**PENUTUP**

**4.1. KESIMPULAN**

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra Perubahan 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 2 sasaran terdiri dari 26 indikator kinerja dengan Predikat Sangat Baik.

**4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**


Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Badan Pendapatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,



**AGUNG SATRIA PONGA, S.T.,M.M**

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19661206 200003 1 003